



► **LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
LPPD/LKPJ
► TAHUN 2019**



*DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT*

Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Palaibari

KATA PENGANTAR

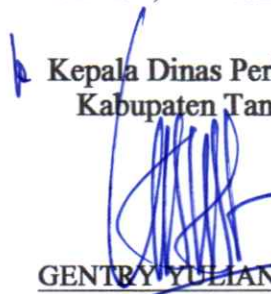
Bismillahirrahmanirrahiim,

Syukur Alhamdulillah telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019 secara sederhana dan singkat ini. Dokumen LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu perlu adanya kesinambungan yang terprogram dan terlaksana sesuai rencana dan selalu di evaluasi potensi dan hambatannya sesuai dengan kondisi yang berkembang. Sehingga pada gilirannya diharapkan apa yang menjadi visi dan misi SKPD menjadi terwujud dan terwujudnya peningkatan pelayanan dan kapabilitas aparatur secara umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 telah berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya Dokumen LPPD SKPD tahun 2019 ini diharapkan memberikan arahan positif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2019


**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,**

GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19660708 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah telah disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2019 secara sederhana dan singkat ini. Dokumen LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja SKPD, oleh karena itu perlu adanya kesinambungan yang terprogram dan terlaksana sesuai rencana dan selalu di evaluasi potensi dan hambatannya sesuai dengan kondisi yang berkembang. Sehingga pada gilirannya diharapkan apa yang menjadi visi dan misi SKPD menjadi terwujud dan terwujudnya peningkatan pelayanan dan kapabilitas aparatur secara umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 telah berjalan lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran selanjutnya.

Selanjutnya Dokumen LPPD SKPD tahun 2019 ini diharapkan memberikan arahan positif bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, Januari 2020

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tanah Laut,**



GENTRY YULIANTONO, SE
Pembina Tk. I
NIP. 19660708 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1) Latar Belakang.....	1
2) Gambaran Umum SKPD	1
a) Struktur Organisasi.....	2
b) Kepegawaian	8
c) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan	12
d) Data Statistik	12
BAB II . PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	20
1) Urusan Wajib	20
a) Tingkat Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	20
b) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan	24
c) Program dan Kegiatan	24
d) Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	26
e) Permasalahan dan solusi	28
BAB III. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	30
3.1 Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintah/ pemerintah Provinsi	30
3.2 Tugas Pembantu yang diberikan	30
BAB IV. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	31
4.1 Kerjasama Daerah	
a) Mitra yang diajak kerjasama	31
b) Dasar Hukum	31
c) Bidang Kerjasama	31
d) Nama Kegiatan	32
e) Sumber dan jumlah anggaran	32
f) Jangka waktu kerjasama.....	32
g) Hasil (output) dari kerjasama	32
h) Permasalahan dan solusi	32
4.2 Pengelolaan Kawasan Khusus	3
BAB V. PENUTUP	33
1) Kesimpulan	34
2) Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan	34
a) Prestasi yang dicapai SKPD.....	34
1. Nama Prestasi.....	34
2. Instansi Penyelenggara.....	34
b) Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan SKPD	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data PNS dan PTT Dinas Perhubungan Tahun 2018	8
Tabel 1.2. Jumlah PNS menurut Tingkat Golongan	9
Tabel 1.3. Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan.....	10
Tabel 1.4. Jumlah PNS menurut Tingkat Jabatan	11
Tabel 1.5. Sarana Prasarana Dinas Perhubungan	12
Tabel 1.6. Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor.....	14
Tabel 1.7. Tarif Retribusi Terminal	16
Tabel 1.8. Tarif Parkir Ditepi Jalan Umum Kabupaten Tanah Laut	17
Tabel 1.9. Tarif Parkir Khusus Kabupaten Tanah Laut	17
Tabel 1.10. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019.....	20
Tabel 1.11. Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019..	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.....	2
Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai	8
Gambar 1.2. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Golongan.....	9
Gambar 1.4. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan	10
Gambar 1.5. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan	11
Gambar 1.6. Peta Administrasi Kabupaten Tanah Laut	13

BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

Dalam upaya melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel maka perlu di jabarkan di antaranya pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah . Dasar Hukum pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

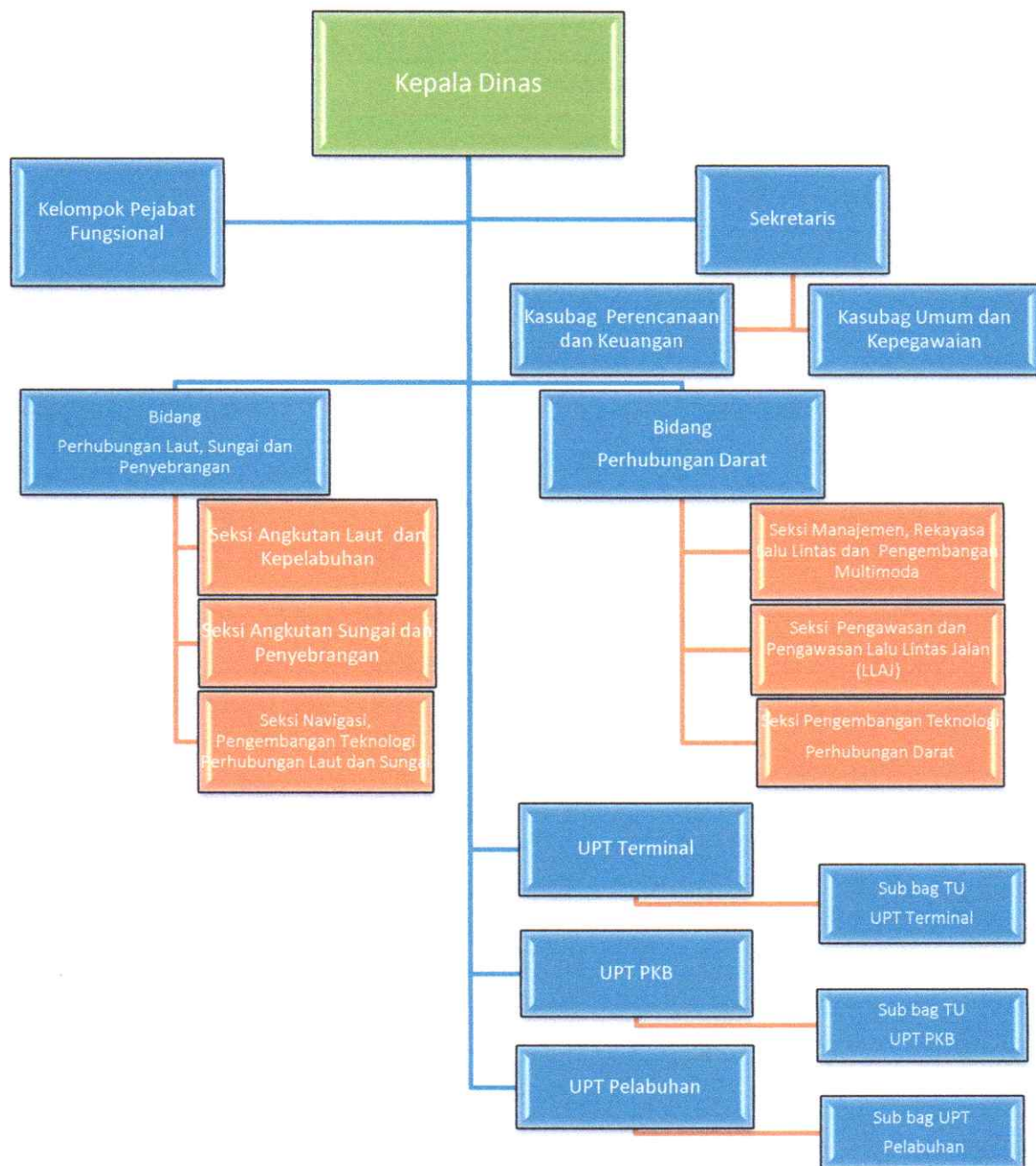
Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut juga mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah / Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah untuk tahun 2019 pada lingkup kerja sektor Perhubungan .

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah /Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada SKPD Dinas Perhubungan merupakan suatu penjabaran penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah di sektor Perhubungan selama kurun waktu satu tahun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) , yang berisi informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun anggaran .

2) Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor : 76 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat seperti gambar di bawah ini :

a) Struktur organisasi Dinas Perhubungan :



Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan di uraikan sebagai berikut :

Dinas Perhubungan;

a. Sekretariat, terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum Kepegawaian.

- b. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan terdiri dari :
 - 1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan;
 - 2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyebrangan: dan
 - 3) Seksi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai.
- c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda;
 - 2) Seksi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ); dan
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat.
- d. UPT Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan Fungsi

Berikut diuraikan Tupoksi dari masing-masing :

- a. Dinas Perhubungan mempunyai tugas :

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Fungsi Dinas Perhubungan :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perhubungan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- Pelaksana administrasi dinas;
- Pembinaan UPT Dinas; dan
- Pelaksana fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sekretariat mempunyai Tugas:

Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Fungsi Sekretariat :

- Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Perhubungan;
- Pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Perhubungan;

- Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perhubungan;
 - Penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan sesuai dengan norma, standardan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/ perlengkapan;
 - Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
 - Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepada Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perhubungan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.
- c. Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan mempunyai Tugas :
Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut.

Fungsi Bidang Perhubungan Laut, Sungai dan Penyebrangan :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- Pelaksanaan kebijakan angkutan sungai dan penyebrangan;
- Pelaksanaan kebijakan navigasi dan pengembangan teknologi perhubungan laut;
- Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan laut, sungai dan penyebrangan;
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan laut;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan laut dan kepelabuhan.

2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyebrangan :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait angkutan sungai dan penyebrangan.

3) Seksi Navigasi, Pengembangan Teknologi Perhubungan Laut dan Sungai mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait navigasi, pengembangan teknologi perhubungan laut dan sungai.

d. Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perhubungan darat.

Fungsi Bidang Perhubungan Darat :

- Penyusunan rencana kerja bidang perhubungan darat;
- Perumusan kebijakan bidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang perhubungan darat;
- Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perhubungan darat ;
- Pelaksanaan kebijakan manajemen, rekayasa lalu lintas dan pengembangan multimoda;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan, operasional lalu lintas angkutan jalan (LLAJ);
- Pelaksanaan Kebijakan pengembangan teknologi perhubungan darat;
- Penyiapan bahan rekomendasi izin bidang perhubungan darat;
- Pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan darat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

1) Seksi Manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait manajemen, Rekayasa Lalu Lintas dan Pengembangan Multimoda.

- 2) Seksi Pengawasan dan Operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengawasan dan operasional Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ).

- 3) Seksi Pengembangan Teknologi Perhubungan Darat mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan teknologi perhubungan darat.

e. UPT Dinas

- 1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- 3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati 96 Tahun 2017 tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada dinas perhubungan kabupaten tanah laut.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

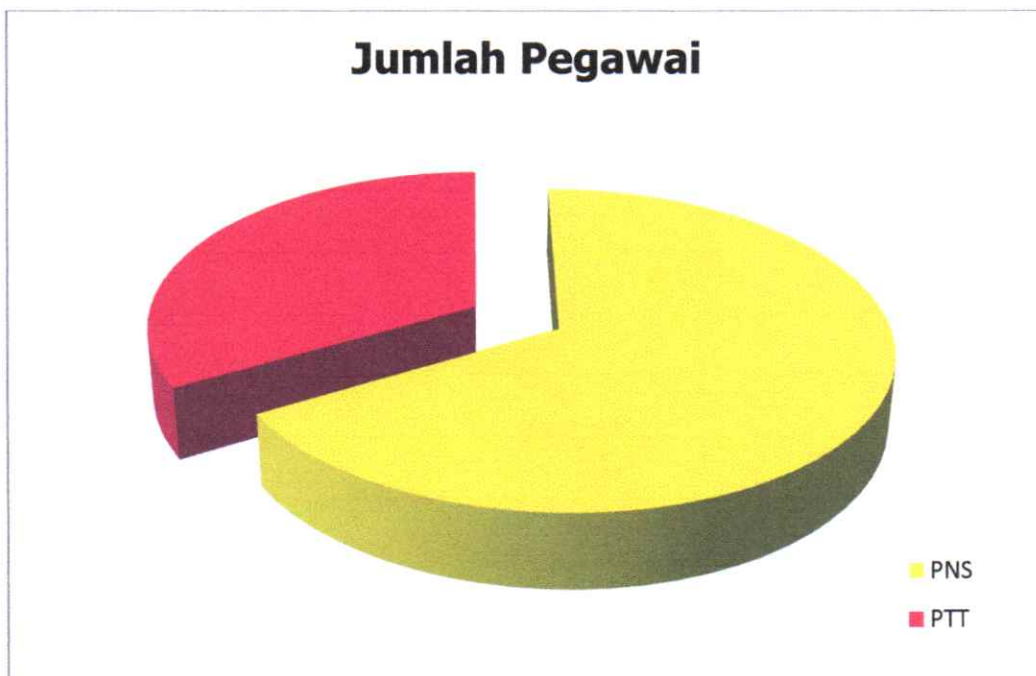
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 9 tahun beban kerja.
- 6) jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Kepegawaian

Data keadaan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Data PNS dan PTT Dishub Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah Pegawai
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	42 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	21 orang
Jumlah		63 orang



Gambar 1.1 : Grafik Jumlah pegawai

Tabel 1.2 : Jumlah PNS menurut tingkat golongan

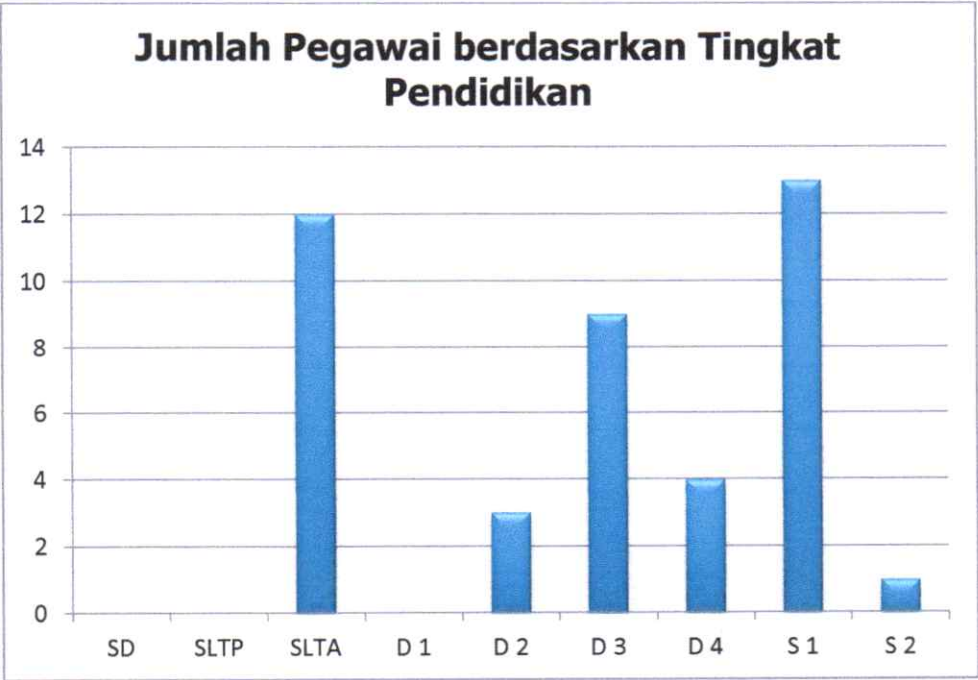
No.	Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Golongan I	
2.	Golongan II	14 orang
3.	Golongan III	25 orang
4.	Golongan IV	3 orang
Jumlah		42 orang



Gambar 1.2 : Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat golongan

Tabel 1.3 : Jumlah PNS menurut tingkat pendidikan

No.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Jumlah Pegawai
1.	SD	-
2.	SLTP	-
3.	SLTA	12
4.	D 1	-
5.	D 2	3
6.	D 3	9
7.	D.4	4
8.	S.1	13
9.	S.2	1
Jumlah		42 orang



Gambar 1.4 :

Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan

Tabel 1.4 : Jumlah PNS menurut tingkat jabatan

No.	Tingkat Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	13
4.	Fungsional Umum	21
5.	Fungsional Tertentu	5
Jumlah		42 orang



Gambar 1.5 :
Grafik Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Jabatan

c) *Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan*

Sarana dan Prasarana guna menunjang operasional kegiatan penyelenggaraan tugas SKPD Dinas Perhubungan di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 1.5 : Sarana Prasarana Dinas Perhubungan

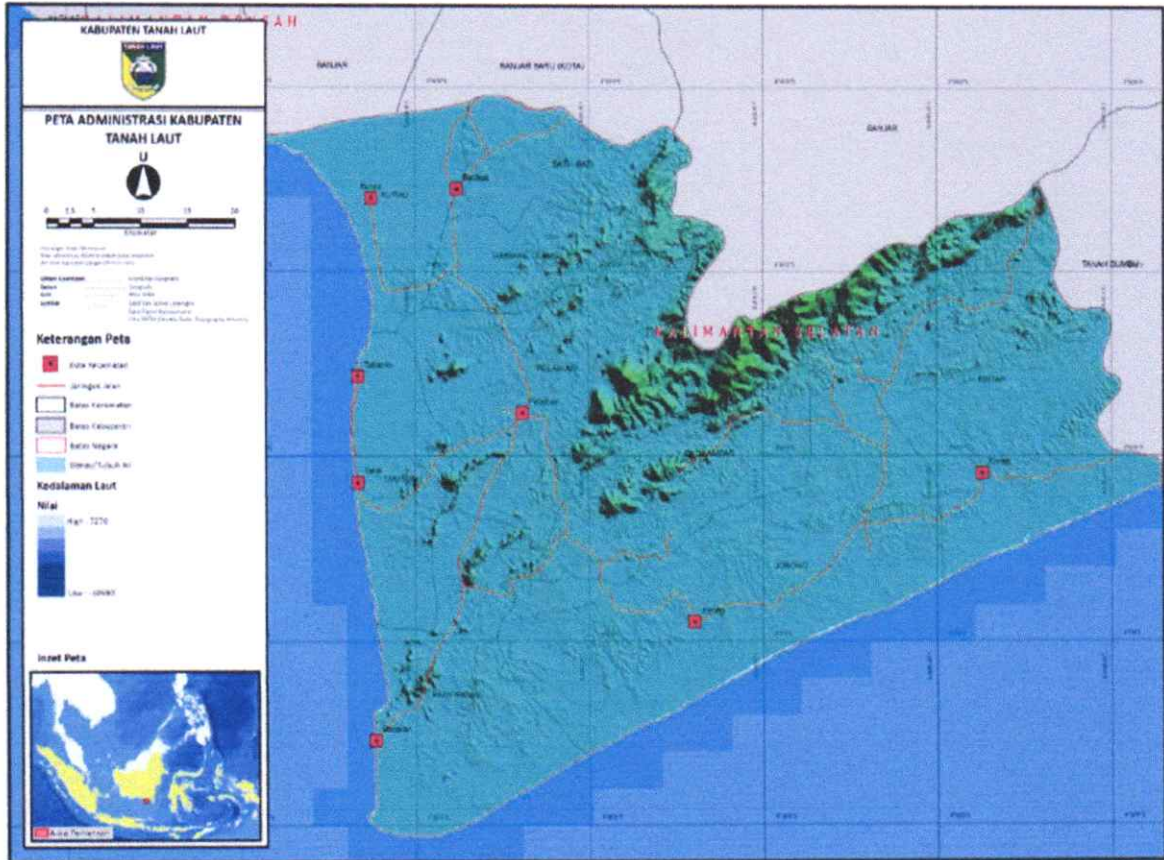
No.	Nama Asset	Jumlah
1.	Gedung kantor	6
2.	Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor	1
3.	Terminal	1
4.	Dermaga	4
5.	Pos UPT Pelabuhan	4
6.	Pos Pengawasan bid. Laut	1
7.	Pos Pengawasan LLAJ	2
8.	Kendaraan Roda 4/2	28
9.	Radio Repeater/Komputer/Laptop	48
10.	Speed boat	2
11.	Rambu	1306
12.	Traffic Light	3
13.	Warning Light	6
14.	Comvek Mirror	5
15.	Gudang Genset	1
16.	Meubelair	160

*Keadaan akhir tahun 2019

d) *Data Statistik*

Kabupaten Tanah Laut dengan ibu kota Pelaihari memiliki wilayah seluas 3.361,35 km². Luas kabupaten ini merupakan 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Geografis kabupaten Tanah Laut terletak diantara 114030'20" dan 115023'31" Bujur Timur, serta diantara 3030'33" dan 4011'38" Lintang Selatan. Kabupaten Tanah Laut memiliki batas administrasi sebagai berikut:

- Batas Utara adalah Kabupaten Banjar,
- Batas Timur adalah Kabupaten Tanah Bumbu,
- Batas Selatan adalah Laut Jawa,
- Batas Barat adalah Laut Jawa.



Gambar 1.6 : Peta Administrasi Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut dikepalai oleh seorang bupati. Mulai dari tahun 1966 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi Dua Belas kali pergantian pemegang jabatan bupati. Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) organisasi perangkat staf pemerintah daerah, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Inspektorat. Bappeda disamping bertugas secara teknis juga mengkoordinasi dan mengintegrasikan usaha penyusunan rencana dan program kerja. Inspektorat merupakan unsur pengawasan dengan tugas pokok melakukan pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Panyipatan, Takisung, Kurau, Bumi Makmur, Bati-Bati, Tambang Ulang, Pelaihari, Bajuin, Batu Ampar, Jorong dan Kintap. Jumlah desa yang tersebar di semua kecamatan adalah 135 desa.

Pelayanan publik yang diselenggarakan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut , sesuai dengan tugas ,pokok dan fungsi , yaitu antara lain :

1. Pelayanan di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor :

Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 4 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor .

Sedangkan Dasar Hukum Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

1.1. Jenis Pelayanan

- a. Pengujian Kendaraan Bermotor pertama kali &berkala/periodik
- b. Surat keterangan Penggunaan Lapisan Kaca film

1.2. Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

1.3. Biaya :

Tabel 1.6 : Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor

No	Pengujian Berkala /Periodik :	Biaya (Rp.)
1	Jasa Ketatausahaan / Pelayanan Administrasi	
	- Kendaraan Baru Uji Pertama / Mutasi Masuk	85.000
	- Uji berkala	10.000
	- Rekomendasi Uji Keluar Daerah	75.000
	- Pengujian emisi gas buang (CO/HC dan asap) untuk kendaraan bermotor tidak wajib uji	92.500
	- Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala	72.500
	- Pembuatan dan Penggantian Bukti Lulus Uji Berkala Hilang	82.500
2	Pelayanan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dijalan Per 6 (Enam) Bulan	
	- JBB s/d 3.000 Kg	72.500
	- JBB 3.001 Kg s/d 6.000 Kg	82.500
	- JBB 6.001 Kg s/d 9.000 Kg	92.500
	- JBB 9.001 Kg s/d 14.000 Kg	102.500

- JBB > 14.000 Kg	112.000
- Kereta gandengan / kereta tempelan	50.000

1.4. Waktu Penyelesaian pelayanan diperkirakan 30 menit

1.5. Potensi yang dapat dikembangkan

Pada tahun 2019 Mobil Kendaraan wajib uji yang melaksanakan Pengujian (kir) baik itu pengujian pertama kali atau uji periodik pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebanyak 6601 unit kendaraan dan besaran Retribusi yang di capai pada tahun 2019 sebesar Rp. 598.670.075.

Dengan bertambahnya jumlah kendaraan diharapkan kendaraan yang melaksanakan uji di Unit Pengujian dapat meningkat pula.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah mobil uji tersebut diantaranya adalah peningkatan mutu pelayanan publik dengan mengganti Buku Uji manual dengan kartu Uji berkala elektronik, pembayaran Retribusi non tunai, dan perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor .

Perubahan tariff baru berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti lulus uji berkala berupa Bukti Lulus Uji berkala elektronik (Smart Card)

2. Pelayanan di UPT Pelabuhan dan Penyeberangan :

2.1. Jenis Pelayanan

Pada UPTD Pelabuhan dan Penyeberangan Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut jenis pelayanan yang di berikan berupa pelayanan keselamatan penyeberangan di Wilayah Kabupaten Tanah Laut terutama di wilayah Penyeberangan Pulau Datu Kecamatan Panyipatan .

3. Pelayanan pada UPT Terminal & Perparkiran

Terminal merupakan stasiun pemberhentian moda transportasi dan tempat naik serta turunnya penumpang serta barang dalam satu wilayah adalah merupakan salah satu hal yang menjadi standar pelayanan minimal di sektor perhubungan pada Kabupaten / Kota .

3.1 Jenis Pelayanan

Pada UPT Terminal & perparkiran melayani 2 Jenis Layanan yaitu :

- a. Pelayanan publik di terminal
- b. Pelayanan perparkiran

3.2 Prosedur layanan

Untuk pelayanan terminal dan perparkiran Prosedur pelayanan yaitu pelayanan langsung ditempat.

3.3 Biaya

- a. Pelayanan di terminal untuk keluar masuk keluar kendaraan dikenakan Retribusi Terminal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal , dengan jenis dan besaran sebagai berikut :

Tabel 1.7 : Tarif Retribusi Terminal

Retribusi Terminal :	Biaya (Rp.)
- Mbl penumpang Bus umum transit AKAP	2.500
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP :	
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat < 15 org	1.000
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat 15 sd 24	1.500
- Mbl penumpang Bus umum transit AKDP seat >24	2.000
- Mbl Bus –minibus trayek pedesaan	1.000
- Mbl penumpang trayek pedesaaan	1.000
- Pemakaian kios/ toko/warung	300.000
- Sewa petak tanah / m2	300
- Pemakaian WC Umum	1.000
-Pemakaian kamar mandi	2.000
- Area Parkir inap / malam bus AKAP/AKDP	3.000
- Area Parkir inap / malam minibus AKDP/ pedesaan	2.000

-Pada lokasi pasar kecamatan :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
-Pada acara hiburan/olahraga /insidentil :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000

3.4.Potensi yang dapat dikembangkan

Untuk pengembangan terminal di Kabupaten Tanah Laut sangat diperlukan, mengingat terminal Tanah Habang sekarang dengan lokasi di tengah kota Pelaihari adalah hak pinjam pakai lokasi milik POLRI kurang memadai , dan telah di lakukan upaya berupa rencana pembangunan terminal tipe C yang refresentatif berlokasi di Desa Ambungan, sehingga diharapkan dapat menjadi stasiun moda transportasi yang dapat melayani trayek antar kecamatan lebih luas, konektifitas jaringan transportasi yang lebih andal.

Dari sisi pendapatan asli daerah , pengembangan terminal pelaihari dapat menjadi sektor andalan juga, dengan lokasi terminal sekarang keberadaan dan kepemilikan toko atau kios merupakan bangunan pribadi dan bukan merupakan asset terminal, sehingga tidak dapat di pungut retribusi kios/toko/warung.

Apabila terminal ke depan telah di bangun pada lokasi baru akan di bangun pula untuk kios/toko dan warung sehingga dapat dipungut retribusi sewa toko/kios dan warung.

Pendapatan asli daerah dari jasa usaha terminal pada tahun 2019 sebesar RP. 105.536.900,- dari target sebesar Rp. 104.600.000,- atau terealisasi 101,00 %.

Untuk pengembangan potensi perparkiran di Kabupaten Tanah Laut sangat menjanjikan.

Dengan objek wisata di beberapa lokasi di Kabupaten Tanah Laut, parkir di tempat khusus di lokasi wisata sangat dapat diharapkan.

Begitu juga dengan lokasi parkir di pasar kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, saat ini pemungutan retribusi parkir di lokasi pasar kecamatan belum begitu optimal, ada beberapa lokasi titik parkir yang masih di kuasai oleh perorangan, dengan pendekatan dan pembinaan yang terus dilakukan oleh personel Dinas Perhubungan di UPT.Terminal dan perparkiran, diharapkan kedepan parkir dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah dari parkir pada tahun 2019 yaitu : dari tempat khusus parkir terealisasi sebesar Rp. 34.340.000 dari target sebesar Rp. 21.400.000,- atau terealisasi 160,46 %, dan dari parkir di tepi jalan umum terealisasi sebesar Rp. 21.520.000,- dari target sebesar Rp. 12.600.000,- atau terealisasi 170,79 %.

- b. Untuk pelayanan parkir ada dua jenis layanan yaitu :
- *Parkir di tepi jalan umum*
Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di tepi jalan umum .
 - *Parkir tempat khusus*
Dasar hukum layanan ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi tempat Khusus Parkir.
Sedangkan besaran tarif parkir di Kabupaten Tanah Laut ada pada tabel berikut :

Tabel 1.8 : Tarif Parkir di tepi jalan umum Kabupaten Tanah Laut

Retribusi Parkir: di tepi jalan umum	Biaya (Rp.)
- Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000

Tabel 1.9 : Tarif Parkir khusus Kabupaten Tanah Laut

Retribusi Parkir:khusus	Biaya (Rp.)
- Pada lokasi non wisata :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000
- Pada lokasi objek wisata :	
- kendaraan jenis truck,bus,alat berat	3.000
- Roda 4 sejenis sedan,box,minibus,pickup,van,jeep	2.000
- kendaraan bermotor Roda 3	1.500
-Kendaraan bermotor Roda 2	1.000

BAB II
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1. Urusan Wajib

- a) Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
- Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut di uraikan pada table berikut :

Tabel 1.10 : Tingkat Pencapaian standar pelayanan minimal
Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
	BIDANG PERHUBUNGAN							
1.	Kebutuhan Administrasi dan Operasional Perkantoran	80%		70 %				
	Dinas Perhubungan (RPJMD)			19,10 %				
1.	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	60%						
2.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	80%		66,7%				
3.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	70%		82,5%				
4.	Penyiapan pelabuhan untuk mendukung keluar masuk arus barang terutama hasil tambang dan perkebunan	80%		60%				
5.	Penyiapan dan pendirian terminal di ambungan	50%		20%				
	Dinas Perhubungan (SPM)							
1	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%		20%				
2	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kabupaten/ kota	75%		8%				
3	Tersedianya halte pada setiap kabupaten / kota yang telah di layani angkutan umum dan trayek	40%		32%				

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
4	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	60%		100%				
5	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten / kota	100%		40,18 %				
6	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 kendaraan	50%		100%				
7	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang terminal pada kabupaten/kota yang telah memiliki terminal	60%		20%				
8	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada kabupaten/kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%		80%				
9	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang MRLL, evaluasi andalalin, pengelolaan parkir pada kabupaten/kota	60%		50%				
10	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum	100%		10%				
11	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/kota	50%		20%				
12	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten / kota pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	90%		40%				
13	Tersedianya kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam kabupaten / kota yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari	100%		20%				

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
14	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau	60%		10%				
15	Terpenuhinya standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu kabupaten/kota	100%		70%				
16	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau	100%		60%				
17	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	75%		0%				
18	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	60%		0%				
19	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%		0%				
20	Terpenuhinya standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran dibawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	40%		80%				
21	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam kabupaten/kota	60%		50%				

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	11	12	13	14	15
22	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan	60%		0%				
23	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam kabupaten/ kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternative angkutan jalan	50%		0%				
24	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota kecamatan dalam kabupaten/kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100%		20%				
25	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran diatas 7 GT yang beroperasi kepada lintas dalam kabupaten/kota	40%		70%				
26	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kopetensi sebagai awak kapal angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100%		20%				

b) Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

Kesesuaian perencanaan yaitu kesesuaian antara Renstra dan Renja kami sajikan dalam tabel terpisah, dalam lampiran laporan ini .

c) Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan tahun Anggaran 2019 dapat di jabarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.11 : Program dan kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.501.688.645,00
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	364.210.445,00
2	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	10.050.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	219.832.000,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29.325.000,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.225.000,00
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.750.000,00
7	Penyediaan alat tulis kantor	42.971.100,00
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.680.000,00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	130.338.300,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.675.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	798.175.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	341.324.300,00
13	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	501.082.000,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.000.000,00
1	Pengadaan Kendaraan dinas /operasional	172.000.000,00
2	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	170.000.000,00
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.050.000,00
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.050.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	383.000.000,00
1	Pendidikandan pelatihan formal	383.000.000,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.870.000,00
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	3.870.000,00
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	667.460.701,00
1	Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat	82.389.701,00
2	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	450.000.000,00
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	135.071.000,00

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.
1	2	3
VII	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	184.278.200,00
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	184.278.200,00
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	974.859.200,00
1	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	257.737.600,00
2	Kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan raya	571.599.000,00
3	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	32.782.600,00
4	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	89.400.000,00
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.340.000,00
IX	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.005.232.500,00
1	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	187.500.000,00
2	Pengadaan marka jalan	711.120.000,00
3	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas laut	106.612.500,00
X	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	261.784.500,00
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	261.784.500,00
XI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	7.000.000,00
1	Penyusunan tabulasi data aset tetap	7.000.000,00

d) Alokasi dan realisasi anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

1. Realisasi Belanja Tidak Langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji pokok PNS/Uang Representasi	2.217.745.941,-	1.852.655.600,-	83,53 %
2	Tunjangan Keluarga	284.145.290,-	186.228.040,-	65,53 %
3	Tunjangan Jabatan	185.010.000,-	149.360.000,-	80,73 %
4	Tunjangan Fungsional	26.250.000,-	21.360.000,-	81,37 %
5	Tunjangan Fungsional Umum	71.750.000,-	50.965.000,-	71,03 %
6	Tunjangan beras	139.915.440,-	105.950.460,-	75,72 %
7	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	14.337.300,-	3.117.750,-	21,74 %
8	Pembulatan Gaji	200.000,-	28.841,-	14, 4 %
9	Tambahan Penghasilan PNS berbasis kinerja	2.986.262.195,-	2.201.584.627,-	73,72 %
Jumlah		5.925.616.166,-	4.571.250.318,-	63,08 %

2. Realisasi Belanja Langsung

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.501.688.645,00	2.054.262.114,00	82,12%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	364.210.445,00	308.143.580,00	84,61%
2	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00 %
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	219.832.000,00	148.976.500,00	67,77%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	29.325.000,00	9.345.650,00	31,38%
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.225.000,00	3.251.800,00	76,96%
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	22.750.000,00	8.152.000,00	35,83%
7	Penyediaan alat tulis kantor	42.971.100,00	42.026.000,00	97,80%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	28.680.000,00	16.158.210,00	56,34%
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	130.338.300,00	118.390.000,00	90,80%
10	Penyediaan makanan dan minuman	8.675.000,00	2.525.000,00	29,11%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	798.175.000,00	693.431.726,00	86,88%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam	341.324.300,00	218.865.000,00	64,12%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5
	daerah			
13	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	501.082.000,00	474.946.648,00	94,78%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	342.000.000,00	310.976.000,00	90,93%
1	Pengadaan Kendaraan dinas /operasional	172.000.000,00	145.600.000,00	84,65%
2	Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	170.000.000,00	165.376.000,00	97,28%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.050.000,00	10.050.000,00	100,00 %
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	10.050.000	10.050.000,00	100,00 %
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	383.000.000,00	98.300.000,00	25,67%
1	Pendidikandan pelatihan formal	383.000.000,00	98.300.000,00	25,67%
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.870.000,00	2.025.000,00	52,33%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	3.870.000,00	2.025.000,00	52,33%
VI	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	667.460.701,00	567.577.553,00	85,04%
1	Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat	82.389.701,00	64.025.000,00	77,71%
2	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	450.000.000,00	408.122.000,00	90,69%
3	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	135.071.000,00	95.430.000,00	70,65%
VII	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	184.278.200,00	94.443.000,00	51,25%
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	184.278.200,00	94.443.000,00	51,25%
VIII	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	974.859.200,00	660.570.650,00	67,76%
1	Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang	257.737.600,00	139.402.650,00	54,09%
2	Kegiatan pengendalian pengoperasian angkutan umum di jalan raya	571.599.000,00	407.257.000,00	71,25%
3	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal	32.782.600,00	27.036.000,00	82,47%
4	Sosialisasi/penyuluhan ketrampilan lalu lintas dan angkutan	89.400.000,00	76.465.000,00	85,53%
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	23.340.000,00	10.410.000,00	44,60%
IX	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1.005.232.500,00	895.129.776,00	89,05%
1	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	187.500.000,00	177.419.000,00	94,62%
2	Pengadaan marka jalan	711.120.000,00	634.597.776,00	89,24%
3	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas laut	106.612.500,00	83.113.000,00	77,96%
X	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	261.784.500,00	242.000.000,00	92,44%
1	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	261.784.500,00	242.000.000,00	92,44%
XI	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	7.000.000,00	1.200.000,00	17,14%

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	2	3	4	5
1	Penyusunan tabulasi data aset tetap	7.000.000,00	1.200.000,00	17,14%
Jumlah		6.341.223.746,00	4.936.534.093,00	77,85%

e) Permasalahan dan solusi

Permasalahan yang di hadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut tahun 2019 :

Permasalahan yang mendasar yang di hadapi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut antara lain adalah :

1. Tenaga Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dengan bidang tugas di bidang Perhubungan , sangat perlu di tingkatkan , para ASN yang terlebih dahulu mengikuti pelatihan Tekhnis Bidang Perhubungan ada beberapa yang mutasi, dan pensiun, sehingga kondisi sekarang Dinas Perhubungan Masih kekurangan tenaga yang kompeten , dan masih memerlukan diklat teknis seperti PPNS Perhubungan, Teknik Terminal,Teknik Perparkiran, Tekhnisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) ,Teknik Manajemen MRLL (Marka,Rambu Lalu Lintas) , Tekhnis Kesyahbandaran, Teknik Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Orientasi LLAJ , dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor .
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai ,kebijakan, peraturan, ataupun prosedur pada bidang perhubungan masih perlu dilakukan dan di tingkatkan, untuk dapat mewujudkan masyarakat Tanah Laut yang sadar aturan sektor Perhubungan seperti taat berlalu lintas, taat menguji kendaraannya, taat membayar retribusi parkir, taat Rambu dan marka jalan .
3. Prasarana Mobilitas baik berupa kendaraan roda 4 ,roda 2 , dan kapal patroli untuk mendukung kinerja petugas hampir mencukupi, hanya perlu penambahan 2 unit kendaraan roda 4 , 4 unit roda 2 dan pemeliharaan rutin , sehingga pada Dinas Perhubungan yang terdiri dari bidang-bidang dan seksi-seksi yang secara teknis lebih banyak berada di lapangan dapat melaksanakan tugas mobilitasnya dengan optimal .

Untuk mengatasi permasalahan mendasar yang dihadapi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut maka diambil kebijakan-kebijakan antara lain :

1. Mengikut sertakan ASN pada Dinas Perhubungan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti PPNS Perhubungan, Teknik Terminal,Teknik Perparkiran, Tekhnisi APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) ,Teknik Manajemen MRLL (Marka,Rambu Lalu Lintas) , Tekhnis Kesyahbandaran, Teknik Rekayasa Lalu Lintas, Teknik Orientasi LLAJ , dan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor , ataupun bimbingan teknis untuk mendukung kinerja petugas itu

sendiri. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengajukan formasi CPNS permintaan tenaga dengan kualifikasi pendidikan sektor perhubungan tertentu kepada instansi terkait dalam hal ini BKPSDM.

2. Merencanakan, menyusun, ataupun merevisi kembali regulasi / ketentuan /peraturan hukum yang dijalankan pada Dinas perhubungan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pengembangan wawasan ke daerah lain yang lebih maju dalam penerapan regulasi/ ketentuan hukumnya.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan menyelenggarakan bintek/ sosialisasi di kabupaten ataupun dengan melakukan sosialisasi langsung ke daerah-daerah yang dituju. Hal lain yang dilakukan adalah dengan melakukan operasional pengendalian disiplin berlalu lintas dan pengawasan sehingga terlaksananya sosialisasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan masyarakat.
4. Mengajukan perencanaan pengadaan prasarana mobilitas sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam anggaran SKPD untuk diajukan kepada Tim Anggaran.

BAB III

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi;
- a) Dasar Hukum
 - b) Instansi Pemberi Tugas Pemabantuan
 - c) Program, Kegiatan
 - d) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan
 - e) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
 - f) Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan
 - g) Permasalahan dan Solusi.
- 3.2. Tugas Pembantuan yang diberikan;
- a) Dasar Hukum
 - b) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan pembantuankan
 - c) Sumber dan Jumlah Anggaran yang digunakan
 - d) Sarana dan Prasarana

Pada SKPD Dinas Perhubungan pada tahun anggaran 2019 tidak ada penyelenggaraan tugas pembantuan .

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

4.1 Kerjasama Daerah

Pada tahun anggaran 2019 Dinas Perhubungan melaksanakan kerjasama dengan berapa pihak. Berikut di jabarkan tentang kerjasama tersebut.

a) Mitra yang diajak kerjasama

1. Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut .

b) Dasar Hukum

Dasar hukum kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yaitu berdasarkan surat perjanjian kerjasama :

b.1 Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Perjanjian kerjasama ini tandatangani pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , tentang Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan Darat .

b.2 Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Perjanjian kerjasama ini tandatangani pada tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat jalan raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi , tentang Peningkatan Pembangunan di Kabupaten Tanah Laut .melalui Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Transportasi Darat (STTD) .

c) Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama antara Sekolah Tinggi Transportasi Darat dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Ruang lingkup Kerjasama yaitu : penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat dan partisipasi pemenuhan

kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten bidang perhubungan darat dengan pola pembibitan untuk wilayah Kabupaten Tanah Laut .

2. Nomor . HK.201/5/21/STTD-2018

Nomor . 188.45/28-PK- KUM/2018

Ruang lingkup kerjasama yaitu : Bidang pendidikan, Bidang penelitian, bidang pengembangan, bidang pengabdian kepada masyarakat, Pengembangan potensi daerah.

d) Nama Kegiatan

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia di Bldang Perhubungan Darat
2. Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Tanah Laut melalui TriDharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat

e) Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber Dana Kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Kegiatan STTD .

f) Jangka Waktu Kerjasama

Jangka waktu perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu lima (5) tahun , dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

g) Hasil (*output*) dari kerjasama

1. Memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten di bidang perhubungan darat Di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah kabupaten .
2. Mempercepat terpenuhinya kebutuhan Sumber daya manusia di bidang perhubungan darat yang berkompeten di wilayah Kabupaten Tanah Laut .

h) Permasalahan dan Solusi.

1. Untuk permasalahan pada kerjasama pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat pada tahun 2018 belum terlihat jelas, karena semua berjalan dengan baik.

4.2 Pengelolaan Kawasan Khusus;

- a) Jenis Kawasan Khusus
- b) Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
- c) Sumber Anggaran
- d) Permasalahan yang dihadapi

Pada SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut pada Tahun anggaran 2019 tidak ada pengelolaan kawasan khusus .

BAB V

PENUTUP

1) Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan, Kabupaten Tanah Laut ini disusun sebagai instrumen manajemen yang dapat digunakan mengukur penyelenggaraan pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut ini didasarkan pada :

1. Kondisi yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
2. Semua unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kab. Tanah Laut, RKPD Tanah Laut, Rencana Strategis Dishub serta Rencana Kerja Dishub Tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dishub Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah SKPD Dinas Perhubungan Tahun 2019 berjalan *lancar sesuai dengan Rencana Kerja SKPD maupun RKPD Tanah Laut*, walaupun masih terdapat kendala dan masalah namun hal tersebut dapat dicarikan solusi sehingga program kerja dapat dilanjutkan baik di tahun anggaran 2019 maupun tahun anggaran selanjutnya.

2) Keberhasilan/ Prestasi/ Penghargaan

a. Prestasi yang dicapai SKPD

Wahana Tata Nugraha adalah suatu penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada Propinsi atau Kabupaten Kota yang mampu menata transportasi Publik yang baik, dari segi sarana maupun prasarananya serta dukungan biaya dalam perencanaannya Wahana Tata Nugraha dilaksanakan selama 2 tahun sekali oleh Kementerian Perhubungan Kabupaten Tanah Laut sebelumnya pernah mengikuti WTN namun masih belum mendapatkan penghargaan.

1. Nama Prestasi

Pada tahun 2019 Kab Tanah Laut mengikuti Wahana Tata Nugraha setelah vakum cukup lama dari kegiatan ini, Kabupaten Tanah Laut mendapatkan penghargaan dalam kategori kota kecil dengan "Penghargaan WAHANA TATA NUGRAHA dengan catatan"

2. Instansi Penyelenggara

Instansi penyelenggara akreditasi ini adalah Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



b. Prestasi yang dicapai oleh lembaga atau masyarakat binaan SKPD disertakan fotokopi sertifikat/ foto penghargaanannya)

1. Nama Prestasi

2. Nama yang berprestasi

3. Instansi Penyelenggara

4. Peringkat dalam perlombaan/ penghargaan

Pada tahun 2019 ada penyelenggaraan lomba atau penghargaan oleh kelompok binaan Dinas Perhubungan , yaitu Lomba Ketertiban Lalu lintas / Pelajar Pelopor keselamatan Berlalu lintas dan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan .

Lampiran

LPPD

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TANAH LAUT

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

KABUPATEN : TANAH LAUT
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : WAJIB PERHUBUNGAN

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional ¹ (yang melekat di kementerian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksa nakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dibagi jumlah program Nasional x 100%	Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 1 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan Perangkat Daerah, sebanyak 1	58,43 %	Lihat Program Nasional RKP 2019 untuk masing-masing urusan, terlampir.
		2	Keberadaan Standard Operating Prosedur (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada sebanyak 1 SOP yang terdiri dari : 1. SOP Dinas Perhubungan	Ada 2 SOP - Nomor 17 tahun 2014 (terlampir) - SOP No.20 tahun 2019 tentang PKB	SOP yg dimaksud adalah SOP teknis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak 7 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 7	100 %	Normalisasi
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	- Jabatan yang ada sebanyak 18 - Jabatan yang harus ada, sebanyak 18	100 %	Sumber data BKD/DUK Perangkat Daerah
		5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, 5	Ada Fungsional PKB	Sumber data BKD/ Perangkat Daerah. Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2019

¹ Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas Perangkat Daerah yang relevan dengan urusan terkait						
		6	Rasio PNS Kabupaten	Jumlah PNS Perangkat Daerah terhadap Total PNS Kabupaten	- PNS Perangkat Daerah , sebanyak 42 personil - Total PNS Kabupaten, sebanyak 5099 personil	0,82 %	Sumber data Mengacu kondisi Perangkat Daerah terakhir/ updated Tahun 2019 / BKD.
		7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim sesuai penjenjangan, sebanyak 0 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 16 org.	52,9 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2018
		8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat Perangkat Daerah yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 12 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jbt.	70,5 %	Sumber data Perangkat Daerah Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2019.
5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah -RENSTRA Perangkat Daerah -RENJA Perangkat Daerah -RKA-Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan Perangkat Daerah berikut jumlahnya	Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra 2. Renja 3. RKA	3 jenis dokumen	Sumber data BAPPEDA/ Perangkat Daerah yang bersangkutan
		11	Jumlah Program RENJA RKPd yang dalam RKA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA RKPd yang tidak diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam RKA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak -- 11 program. - Jumlah Program dalam RKA Perangkat Daerah, sebanyak -- 11 program.	100 %	Sumber data Perangkat Daerah. Mengacu dokumen RKA dan Renja-Perangkat Daerah ybs.

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
	Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah	Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah dibagi jumlah program dalam DPA Perangkat Daerah x 100%	- Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program. - Jumlah Program dalam DPA Perangkat Daerah, sebanyak 11 program.	100 %	Sumber data dari dokumen RKA-Perangkat Daerah tahun 2016 dan dokumen DPA-Perangkat Daerah ybs tahun 2019.
6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran Perangkat Daerah dibagi total APBD x 100%	- Total Anggaran Perangkat Daerah, sebesar Rp.12.266.879.912,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 1.746.968.360.693,50	0,70%	Sumber data dari APBD tahun 2019 terakhir. (anggaran)
		14	Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah	Belanja modal dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- Belanja Modal Perangkat Daerah, sebesar Rp.1.006.034.591,- - Total Belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 292.970.630.760,32	0,34 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa	total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah x 100%	- Total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp. 275.335.000 .- Total belanja barang dan jasa Perangkat Daerah, sebesar Rp. 5.072.198.355,-	5,43%	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
	Besaran belanja pemeliharaan	16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah	total belanja pemeliharaan dibagi total belanja Perangkat Daerah x 100%	- total belanja pemeliharaan Perangkat Daerah, sebesar Rp.275.335.000,- Total belanja Perangkat Daerah, sebesar Rp. 12.266.879.912,-	2,24 %	Sumber data dari realisasi APBD tahun 2019 terakhir.
		17	Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah (Neraca, LRA, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan Perangkat Daerah berikut komponen yang ada (Neraca, LRA, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, Sebanyak 3 jenis, sbb: 1. LRA 2. Neraca 3. Calk	Ada sebanyak 3 jenis :	Sumber data dari Laporan Keuangan Perangkat Daerah. Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)

ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset Perangkat Daerah	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada	Sumber data dari BPKAD, dokumennya (Investarisasi dilakukan miimal 1 kali dalam 5 Tahun).
	Penggunaan Asset Perangkat Daerah	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah	Jumlah asset yang tidak digunakan Perangkat Daerah dibagi total asset yang dikuasai Perangkat Daerah x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak 1 - Asset yang dikuasai Perangkat Daerah, sebanyak 1837	0,05 %	Pembilang : 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Investarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/ Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/dimanfaatkan Penyebut : Aset layak pakai tetapi yang tidak digunakan/dimanfaatkan
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk prasarana masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1. Info Pengaduan 2. Kotak saran 3. Aplikasi Survey kepuasan	Jumlah sebanyak 3 jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada (di foto dilampirkan)
	Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang pelayanan publik	Ada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

KEPALA DINAS,



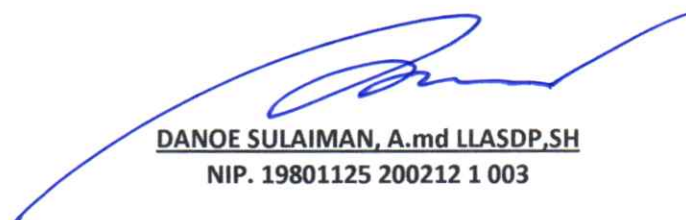
GENTRY YUDIANTONO, SE
 NIP. 19660708 199303 1 002

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

IK.2

NO	TRAYEK	FREKWENSI DALAM 1 MINGGU	BOBOT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	tanjung Dewa - Pulau Datu	± 56 kali / Minggu	1	Obyek Wisata Pulau Datu
2	Muara Kintap - Kampung Bugis seberang	± 90 kali / Minggu		Dermaga Sungai Desa Muara Kintap
3	Panjaratan - Wisata Bekantan	± 2kali / Minggu		Wisata Susur Sungai
4	Muara Asam-asam - Pulau Keramaian	0		Rencana
5	Muara Asam-asam - Pulau Masa Lembu	0		Rencana
	Jumlah	± 148 kali / Minggu	1	5 Kebutuhan Trayek

**KEPALA BIDANG
PERHUBUNGAN LAUT, SUNGAI, DANAU & PENYEBERANGAN**


DANOE SULAIMAN, A.md LLASDP,SH
NIP. 19801125 200212 1 003

RASIO KONEKTIVITAS KABUPATEN

IK. 1

Trayek Angkutan Perintis Kabupaten Tanah Laut

No	Trayek	Frekuensi (Dalam Minggu)	Bobot	Jumlah Trayek
1	Pelaihari - Tabanio (Kec. Takisung)	7	1	1
2	Pelaihari - Batakan (Kec. Panyipatan)	7	1	1
3	Pelaihari - Jorong (Kec. Jorong)	7	1	1
4	Pelaihari - Riam Pinang (Kec. Bajuin)	0	0	1
5	Pelaihari - Bumi Makmur (Kec. Bumi Makmur)	0	0	1
6	Pelaihari - Bentok Darat (Kec. Bati-bati)	0	0	1
7	Pelaihari - Batu Ampar (via Pemalangan) (Kec. Batu Ampar)	0	0	1
8	Pelaihari - Ujung Batu (via panjaratan)	0	0	1
9	Pelaihari - Panyipatan (Via Tajau Pecah)	0		1
Jumlah			3	9

Data Trayek Tambahan dalam 5 Tahun 2019 - 2023
(Perintis dan AKAP)

No	Trayek	Jumlah Trayek
1	Pelaihari - Riam Pinang (Kec. Bajuin)	1
2	Pelaihari - Bumi Makmur (Kec. Bumi Makmur)	1
3	Pelaihari - Bentok Darat (Kec. Bati-bati)	1
4	Pelaihari - Batu Ampar (via Pemalangan) (Kec. Batu Ampar)	1
5	Pelaihari - Ujung Batu (via panjaratan)	1
6	Pelaihari - Panyipatan (Via Tajau Pecah)	1
Jumlah		6

No	Bobot trayek	
1	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (>5x dalam seminggu)	1
2	Bobot Trayek Frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu)	0.8
3	Bobot Trayek Frekuensi Tinggi (<3 dalam seminggu)	0.5

IK1(Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang di layani pada kabupaten x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten		
IK1	=	3 x 1 / 9
		0.33333333

KEPALA BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT



H. YUDRIANOOR, S.Sos
NIP. 19620313 198603 1 012

KINERJA LALULINTAS KABUPATEN/KOTA
VISI RASIO DIJALAN KABUPATEN

No.	Link	Nama Segmen Ruas	Fungsi Jalan	Status	P/jg Link(m)	Lebar Jalur Efektif	Lebar Lajur (m)	Median (m)	Lebar Bahu (m)	Tipe Jalan	Tipe Hambatan Samping	Co	Fcw	FCsp	FCsf	FCs	C	Volume	V/C Ratio
1	122-111	BAUREJO	LOKAL	Kabupaten	540	9.7	4.85	0	0.00	2/2 UD	SEDANG	2900	1.29	1	0.86	0.9	2895.53	585.30	0.20
2	111-122	BAUREJO	LOKAL	Kabupaten	540	9.7	4.85	0	0.00	2/2 UD	SEDANG	2900	1.29	1	0.86	0.9	2895.53	602.90	0.21
3	126-129	GAGAS PERMAI	LOKAL	Kabupaten	485	7.8	3.9	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.9	0.9	2677.86	286.40	0.11
4	129-126	GAGAS PERMAI	LOKAL	Kabupaten	485	7.8	3.9	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.9	0.9	2677.86	259.80	0.10
5	126-129	ATU ATU	LOKAL	Kabupaten	2200	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	475.05	0.36
6	129-126	ATU ATU	LOKAL	Kabupaten	2200	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	461.5	0.35
7	105-1210	SOEPIRMAN	LOKAL	Kabupaten	1230	5.2	2.60	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	379.50	0.19
8	1210-105	SOEPIRMAN	LOKAL	Kabupaten	1230	5.2	2.60	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	353.25	0.17
9	1211-1212	GEMBIRA	LOKAL	Kabupaten	360	7.7	3.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.9	0.9	2677.86	305.70	0.11
10	1212-1211	GEMBIRA	LOKAL	Kabupaten	360	7.7	3.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.9	0.9	2677.86	311.35	0.12
11	1212-1213	DATU DAIM	LOKAL	Kabupaten	453	6.3	3.15	0	0.00	2/2 UD	SANGAT TINGGI	2900	1	1	0.68	0.9	1774.8	498.80	0.28
12	1213-1212	DATU DAIM	LOKAL	Kabupaten	453	6.3	3.15	0	0.00	2/2 UD	SANGAT TINGGI	2900	1	1	0.68	0.9	1774.8	488.20	0.28
13	1214-1215	SUM SUM	LOKAL	Kabupaten	2000	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	317.25	0.24
14	1215-1214	SUM SUM	LOKAL	Kabupaten	2000	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	451.00	0.34
15	1216-1217	PASAR HEWAN	LOKAL	Kabupaten	279	7	3.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.9	0.9	2349	340.50	0.14
16	1217-1216	PASAR HEWAN	LOKAL	Kabupaten	279	7	3.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.9	0.9	2349	472.50	0.20
17	1218-1219	SAMUDERA	LOKAL	Kabupaten	329	6.8	3.40	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.92	0.9	2401.2	455.15	0.19
18	1219-1218	SAMUDERA	LOKAL	Kabupaten	329	6.8	3.40	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.92	0.9	2401.2	511.65	0.21
19	1220-1221	PERINTIS	LOKAL	Kabupaten	1500	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	325.25	0.16
20	1221-1220	PERINTIS	LOKAL	Kabupaten	1500	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	285.75	0.14
21	1222-1223	SAWAHAN	LOKAL	Kabupaten	310	6.2	3.10	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.9	0.9	2349	338.00	0.14
22	1223-1222	SAWAHAN	LOKAL	Kabupaten	310	6.2	3.10	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1	1	0.9	0.9	2349	371.00	0.16
23	127-1223	VETERAN	LOKAL	Kabupaten	100	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	203.10	0.15
24	1223-127	VETERAN	LOKAL	Kabupaten	100	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	197.85	0.15
25	1224-1225	TAGWA	LOKAL	Kabupaten	250	7.5	3.75	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.95	0.9	2826.63	247.55	0.09
26	1225-1224	TAGWA	LOKAL	Kabupaten	250	7.5	3.75	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	1.14	1	0.95	0.9	2826.63	197.85	0.07
27	1226-1227	KERAMAT	LOKAL	Kabupaten	160	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	156.50	0.08
28	1227-1228	KERAMAT	LOKAL	Kabupaten	160	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	168.00	0.08
29	1229-1230	PUSARA	LOKAL	Kabupaten	390	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	348.25	0.17
30	1230-1229	PUSARA	LOKAL	Kabupaten	390	5.6	2.80	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	428.50	0.21
31	1231-1232	ABASDI	LOKAL	Kabupaten	230	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	441.00	0.34
32	1232-1233	ABASDI	LOKAL	Kabupaten	230	5	2.50	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	382.50	0.29
33	1234-1235	KSTUBUN	LOKAL	Kabupaten	370	5.2	2.60	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	239.50	0.12
34	1235-1236	KSTUBUN	LOKAL	Kabupaten	370	5.2	2.60	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	201.00	0.10
35	1237-1238	AL-MANAR	LOKAL	Kabupaten	620	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	135.55	0.10
36	1238-1239	AL-MANAR	LOKAL	Kabupaten	620	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	110.15	0.08
37	1240-1241	ABDUL GHANI	LOKAL	Kabupaten	90	4.8	2.4	0	0.50	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	70.70	0.05
38	1241-1240	ABDUL GHANI	LOKAL	Kabupaten	90	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	96.70	0.07
39	1242-1243	SWADAYA	LOKAL	Kabupaten	320	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	437.75	0.33
40	1243-1242	SWADAYA	LOKAL	Kabupaten	320	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	569.25	0.43
41	1244-1245	PURNAWIRAWAN	LOKAL	Kabupaten	820	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	298.75	0.23
42	1245-1244	PURNAWIRAWAN	LOKAL	Kabupaten	820	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	331.75	0.25
43	1246-1247	MANUNGAL	LOKAL	Kabupaten	670	4.5	2.25	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.95	0.9	1388.52	202.90	0.15
44	1247-1246	MANUNGAL	LOKAL	Kabupaten	670	4.5	2.25	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.95	0.9	1388.52	199.35	0.14
45	122-111	DATU INSAD	LOKAL	Kabupaten	550	5	2.5	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	395.05	0.30
46	111-121	DATU INSAD	LOKAL	Kabupaten	550	5	2.5	0	0.80	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	397.50	0.30
47	221-222	MATAH	LOKAL	Kabupaten	1100	5.4	2.70	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	208.60	0.10
48	222-221	MATAH	LOKAL	Kabupaten	1100	5.4	2.70	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	196.90	0.10
49	1248-1249	BASUKI RAHMAT	LOKAL	Kabupaten	1300	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UD	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	150.50	0.11

No.	Link	Nama Segmen Ruas	Fungsi Jalan	Status	Plg Link(m)	Lebar Jalur Efektif	Lebar Lajur (m)	Median (m)	Lebar Bahu (m)	Tipe Jalan	Tipe Hambatan Sampling	Co	Few	FCsp	FCsf	FCcs	C	Volume	V/C Ratio
50	1249-1248	BASUKI RAHMAT	LOKAL	Kabupaten	1300	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	169.70	0.13
51	106-107	HUTAN KOTA	LOKAL	Kabupaten	385	4.8	2.4	0	0.50	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	154.80	0.12
52	107-106	HUTAN KOTA	LOKAL	Kabupaten	385	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	159.00	0.12
53	108-109	PROF.SOEPOMO	LOKAL	Kabupaten	800	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	162.95	0.12
54	109-108	PROF.SOEPOMO	LOKAL	Kabupaten	800	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	170.50	0.13
55	1247-1248	MUHAIIRIN	LOKAL	Kabupaten	335	5	2.5	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	115.95	0.09
56	1248-1247	MUHAIIRIN	LOKAL	Kabupaten	335	5	2.5	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	113.75	0.09
57	1249-1250	NOORSEHAT	LOKAL	Kabupaten	350	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	320.45	0.24
58	1250-1249	NOORSEHAT	LOKAL	Kabupaten	350	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	282.75	0.21
59	1010-1011	NIAGA	LOKAL	Kabupaten	330	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	249.25	0.19
60	1011-1010	NIAGA	LOKAL	Kabupaten	330	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	271.50	0.21
61	324-325	PT-SUN	LOKAL	Kabupaten	3200	5.4	2.7	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	158.15	0.12
62	325-324	PT-SUN	LOKAL	Kabupaten	3200	5.4	2.7	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	170.00	0.13
63	1012-1013	KAMPUNG KARIYUP	LOKAL	Kabupaten	660	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	183.20	0.14
64	1013-1014	KAMPUNG KARIYUP	LOKAL	Kabupaten	660	4.8	2.4	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	176.10	0.13
65	1251-1252	MAJAKELUNG	LOKAL	Kabupaten	250	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	334.25	0.25
66	1252-1251	MAJAKELUNG	LOKAL	Kabupaten	250	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	295.25	0.22
67	1253-1254	DHARMA	LOKAL	Kabupaten	155	5	2.5	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	342.85	0.26
68	1254-1253	DHARMA	LOKAL	Kabupaten	155	5	2.5	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	314.15	0.24
69	1255-1256	PUSAKA	LOKAL	Kabupaten	857	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	318.70	0.24
70	1256-1257	PUSAKA	LOKAL	Kabupaten	857	5.6	2.8	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.56	1	0.9	0.9	1315.44	297.05	0.23
71	1258-1259	IRUP	LOKAL	Kabupaten	100	5.2	2.6	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	304.85	0.15
72	1259-1258	IRUP	LOKAL	Kabupaten	100	5.2	2.6	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	263.40	0.13
73	1259-1260	KARYA	LOKAL	Kabupaten	140	4.6	2.3	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	302.65	0.15
74	1260-1259	KARYA	LOKAL	Kabupaten	140	4.6	2.3	0	0.00	2/2 UID	RENDAH	2900	0.87	1	0.9	0.9	2043.63	242.15	0.12

KEPALA BIDANG
PERHUBUNGAN DARAT



H.YUDRIANOOR, S.Sos
NIP. 19620313 198603 1 012